

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA KENDARAAN
BERMOTOR (STNKB)
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn**

Grace J A Daud F Simarmata *
Dr. Tajudin Noor, S.H, M.Hum., Sp.N**
Dr. Cut Nurita, S.H., M.H ***

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat dan salah satu kejahatan pemalsuan adalah pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB), bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB), bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn

.Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa.

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan adanya alasan peniadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), terdakwa Bagus Wahyudi yang telah terbukti melakukan pemalsuan surat sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim adalah Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemalsuan

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL REVIEW OF THE ACCOUNTABILITY OF THE PERPETRATOR
OF THE CRIMINAL ACT OF FORGERY OF MOTOR VEHICLE
REGISTRATION CERTIFICATE (STNKB)
(Analysis of Medan District Court Decision Number
1048/Pid.B/2021/PN Mdn**

Grace J A Daud F Simarmata *
Dr. Tajudin Noor, S.H, M.Hum., Sp.N**
Dr. Cut Nurita, S.H., M.H ***

ABSTRACT

The crime of forgery is a crime that often occurs in various fields and even the perpetrators are from various levels of society and one of the crimes of forgery is the forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB). The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulations for forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB), how is the criminal responsibility for forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB), how is the judge's legal consideration in criminal acts forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB) based on Medan District Court Decision Number 1048/Pid.B/2021/PN Mdn

. This thesis uses a library research method to examine secondary data by analyzing the case of decision Number 1048/Pid.B/2021/PN Mdn. The type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively.

The criminal law provisions for the crime of forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB) are regulated in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and all elements of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code have been fulfilled, thus the charges against the defendant have been proven legally and convincingly, then the Panel of Judges considers whether the defendant's actions that have been proven can be accounted for or blamed on the defendant.

The conclusion of the discussion is that criminal liability for forgery of Motor Vehicle Registration Certificates (STNKB) is based on an error that fulfills the elements of being against the law and the existence of reasons for the elimination/removal of the unlawful nature of the act committed. The criminal liability is based on the element of intent by the perpetrator (dolus), the defendant Bagus Wahyudi who has been proven to have forged the letter so that the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 3 (three) months. The judge's legal consideration is that the Panel of Judges did not see any reasons for forgiveness, justification or that could eliminate the error or unlawful nature of the defendant's actions, therefore the defendant must be found guilty of committing the crime charged to him, namely violating Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Accountability, Perpetrator, Forgery

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*